

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ukuran Perusahaan

Definisi dari ukuran perusahaan menurut Riyanto (1999:313), yaitu :
“Besarnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan, atau nilai total aktiva”.

Menurut Undang-undang No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil point b, menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki hasil penjualan tahunan menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digolongkan ke dalam kelompok usaha kecil. Dengan adanya ketentuan ini, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan yang memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dapat dikelompokkan ke dalam industri menengah dan besar.

Selain itu, ukuran perusahaan yang didasarkan pada *total assets* yang dimiliki oleh perusahaan diatur dengan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa :

“Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan (*total assets*) tidak lebih dari 100 milyar rupiah”

Menurut Small Business Organization (2000), klasifikasi bisnis berdasarkan ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Classification of business by size

Size	Employment Size	Asset Size	Sales Size
Small Business	0 – 500 employees	\$0 - \$25 million	\$0 - \$50 million
Medium Business	500 – 999 employees	\$25 - \$100 million	\$50 - \$250 million
Large Business	1000 or more	\$100 million or more	\$250 million or more

Sumber : Office of Economics Research, U.S Small Business Administration

Pada umumnya, perusahaan yang besar mengungkapkan lebih banyak informasi dibanding perusahaan kecil. Variable *size* merupakan variable yang paling konsisten berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. (Meek, Roberts & Gray, 1995).

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dikarenakan total aktiva perusahaan bernilai milyaran rupiah maka hal ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikannya ke dalam logaritma natural, sehingga ukuran perusahaan juga dapat dihitung dengan :

$$\text{Size} = \text{Ln Total Assets}$$

(Merliana Benardi dan Sutrisno : 2008)

2.1.2 Porsi Kepemilikan Saham Publik

Porsi kepemilikan saham publik adalah porsi saham beredar (*outstanding share*) yang dimiliki masyarakat atau publik domestik (*degree of public ownership*). Kepemilikan publik adalah kepemilikan masyarakat umum (bukan institusi yang signifikan) terhadap saham perusahaan publik. Suharli dan Rachpriliani (2006) mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan dapat disebut juga sebagai struktur kepemilikan saham, yaitu suatu perbandingan

antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan (*insider ownership's*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership's*).

Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap suara publik atau masyarakat. Adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan.

Semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik, maka semakin besar tekanan yang dihadapi perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya. Hal ini dikarenakan dengan semakin besar porsi kepemilikan publik, maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga semakin banyak pula butir-butir informasi yang mendetail yang dituntut untuk dibuka dalam laporan tahunan.

Variabel porsi kepemilikan saham publik merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan Cerf (1961), Singhvi dan Desai (1971), dan Tjakraadinata (2000).

Dalam penelitian ini, variabel struktur kepemilikan diukur berdasarkan rasio saham yang dimiliki oleh masyarakat (publik) terhadap total saham perusahaan.

$$\text{Porsi kepemilikan saham publik} = \frac{\text{Saham yang dimiliki oleh publik}}{\text{Total saham}} \times 100\%$$

(Simanjuntak dan Widiastuti, 2004:358)

2.1.3 Pengungkapan (*Disclosure*)

Kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Chariri dan Ghozali, 2000:235). Hendriksen (2002:429) mengatakan secara sederhana, pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (*the release of information*).

Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan berbeda-beda dalam kondisi yang berbeda pula. Sebagai salah satu prinsip dalam Akuntansi Keuangan, kadangkala istilah pengungkapan dikaitkan secara langsung dengan laporan keuangan (*financial statement*). Dalam kenyataannya dengan pengungkapan juga berhubungan dengan informasi lain di luar laporan keuangan.

Pengungkapan atau *Disclosure* adalah mengkomunikasikan atau menjelaskan tentang posisi dan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak eksternal atau pengguna laporan keuangan. Dan dibawah ini beberapa pengertian dari Pengungkapan atau *Disclosure*, yaitu :

Secara Konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Sedangkan secara teknis pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan (Suwardjono. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta. 2005).

Menurut Harry I. Wolk, dkk (1992) dalam buku *Accounting Theory, A Conceptual and Institutional Approach*, pengungkapan didefinisikan :

“...disclosure is concerned with information in both financial statements and supplementary communications-including footnotes, post statements events, management’s analysis of operations for the forthcoming financial, and operating forecasts, and additional financial statements covering segmental disclosure and extentions beyond historical costs.”

Dari definisi di atas maka istilah pengungkapan dapat digunakan baik dalam laporan keuangan maupun laporan yang lainnya dengan alat penelitian (*proxy*) yang berbeda-beda. Penelitian penulis memfokuskan pengungkapan pada laporan tahunan (*annual report*), bukan pada laporan keuangan (*financial report*).

Sebagaimana yang dikutip dari Aida (2002) secara garis besar pengungkapan (*Disclosure*) mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Dasar

Terdiri dari tiga laporan yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Perubahan Posisi keuangan. *Disclosure* dalam laporan keuangan bisa dalam bentuk laporan tersebut dan tabel-tabel yang menjelaskan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan yang disajikan secara komperatif dengan periode yang lalu.

2. Catatan Kaki

Catatan kaki merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dasar. Sehingga dalam catatan kaki ini sering disajikan catatan yang berhubungan dengan item-item neraca dan laporan laba rugi.

3. Data Statistik

Data ini disusun dan diolah dari angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dasar dan seringkali disajikan secara terpisah di dalam laporan tambahan.

4. Laporan Auditor

Laporan ini merupakan media yang paling sesuai untuk mengungkapkan penyimpangan dan akibat penyimpangan penerapan prinsip akuntansi dari prinsip akuntansi yang berterima umum, perubahan metode akuntansi dan akibatnya, perbedaan pendapat antara auditor dan manajemen perusahaan yang diaudit.

Darrouh (1993) mengemukakan ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu :

1. Pengungkapan Wajib (*mandated disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya. Luas pengungkapan wajib tidak sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Negara maju dengan regulasi yang lebih baik akan mensyaratkan pengungkapan minimum atas lebih banyak butir dibandingkan dengan yang disyaratkan negara berkembang.

2. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Healy dan Palepu (1995) mengemukakan meskipun semua perusahaan publik diwajibkan memenuhi pengungkapan minimum, mereka berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkap ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

Menurut Hendriksen (2002:432) ada tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan, yaitu :

1. Pengungkapan cukup (*Adequate disclosure*)

Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

2. Pengungkapan wajar (*Fair disclosure*)

Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung menyiratkan suatu etika, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan keuangan.

3. Pengungkapan penuh (*Full disclosure*)

Pengungkapan penuh menyangkut penyajian informasi yang relevan. Bagi sebagian orang pengungkapan penuh berarti penyajian informasi secara

berlimpah sehingga tidak tepat. Menurut mereka, terlalu banyak informasi akan membahayakan. Karena penyajian rinci dan yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan membuat laporan keuangan sulit ditafsir.

2.1.3.1 Laporan Tahunan

Teori tentang laporan tahunan (*annual report*) dalam literatur-literatur akuntansi sangat jarang dikemukakan, walaupun ada maka pembahasannya tergabung dengan topik penyajian laporan keuangan dan secara parsial tidak seluruhnya.

Keseluruhan isi dari laporan tahunan tidak diatur oleh otoritas badan akuntansi yang berwenang seperti Ikatan Akuntansi Indonesia, namun diatur oleh regulator bursa efek (Badan Pengawas Pasar Modal).

Laporan tahunan wajib diungkapkan oleh setiap perusahaan yang mencatatkan diri di bursa efek sebagai pelaporan kegiatan selama satu tahun sebelumnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (*stakeholders*).

Definisi laporan tahunan secara tidak langsung dikutip dari Knutson (1997) yang menyatakan :

“At the top every analyst’s list (of financial reports used by analysts) is the annual report to shareholders. Is the major reporting document and every other financial report is in some respect subsidiary or supplementary to it.”

Adapun yang menjadi tujuan dari laporan tahunan :

1. Menyediakan informasi yang berguna bagi orang-orang yang mengerti aktivitas bisnis dan ekonomi dalam membuat keputusan investasi dan kredit.
2. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor dan pengguna lainnya dalam memprediksi arus kas masa depan.
3. Menyediakan informasi mengenai aset (*assets*), klaim terhadap aset (*liability* dan *equity*) dan perubahan-perubahan yang terjadi.

2.1.3.2 Peraturan Bapepam Mengenai Laporan Tahunan

Laporan Tahunan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya diatur oleh keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-38/PM/1996 mengenai Laporan Tahunan. Peraturan tersebut berlaku hanya bagi perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut telah diperbaharui yaitu dengan keluarnya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-134/BL/2006 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, sebanyak 4 (empat) eksemplar dan sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar dalam bentuk asli. Laporan tahunan dalam bentuk

asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib ditandatangani secara langsung oleh direksi dan komisaris.

Dalam hal Emiten hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang, maka kewajiban penyampaian laporan tahunan berlaku sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya.

Dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan.

Bentuk dan isi laporan tahunan menurut peraturan Bapepam secara garis besar dibagi menjadi :

1. Ketentuan Umum, yang berisi peraturan fisik dan informasi yang wajib disampaikan oleh emiten
2. Ikhtisar Data Keuangan Penting yang memuat informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun.
3. Laporan Dewan Komisaris

Laporan dewan komisaris sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan;

- b) pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi;
- c) komite-komite yang berada dibawah pengawasan dewan komisaris; dan
- d) perubahan komposisi anggota dewan komisaris (jika ada).

4. Laporan Direksi

Laporan direksi sekurang-kurangnya memuat antara lain uraian singkat mengenai kinerja perusahaan, gambaran umum mengenai prospek usaha, penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan, dan perubahan komposisi anggota direksi (jika ada).

5. Profil Perusahaan

Profil perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) nama dan alamat perusahaan;
- b) riwayat singkat perusahaan;
- c) bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan;
- d) struktur organisasi dalam bentuk bagan;
- e) visi dan misi perusahaan;
- f) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris;
- g) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota direksi;

6. Analisis dan Pembahasan Manajemen

Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi lain dengan penekanan pada perubahan-perubahan material yang terjadi dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir.

7. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir.

8. Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan

9. Laporan Keuangan Laporan tahunan wajib memuat Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

10. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit

Laporan tahunan wajib memuat laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di bidang akuntansi serta wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

11. Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris

Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang sedang menjabat;

2.1.3.3 Indeks Pengungkapan Laporan Tahunan

Indikator empiris pengungkapan disebut indeks pengungkapan (*Disclosure Index*). Indeks pengungkapan merupakan rasio antara jumlah elemen (*item*) informasi yang dipenuhi dengan jumlah elemen informasi maksimum dipenuhi. Banyaknya item informasi dalam laporan tahunan yang digunakan untuk menghitung indeks pengungkapan bervariasi antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, seperti Botosan (1997) menggunakan 35 item, Marwata (2000) dan Fitriani (2001) 134 item.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Botosan (1997) maka *disclosure index* pada laporan tahunan diuraikan sebagai berikut :

1. Latar Belakang Perusahaan; latar belakang perusahaan memuat antara lain tujuan perusahaan, pembahasan halangan masuk industri, situasi persaingan, penjelasan bisnis perusahaan, penjelasan produk dan penjelasan pasar perusahaan. Informasi ini juga terdapat dalam peraturan Bapepam No. KEP-134/BL/2006.
2. Ringkasan Laporan Keuangan Selama 10 atau 5 Tahun Terakhir; Pengungkapan mengenai perlunya *financial highlights* selama 5 tahun terakhir atau sejak memulai usahanya merupakan pengungkapan wajib dalam peraturan Bapepam. Pemberian informasi yang berkaitan dengan *financial highlights* yaitu *Return*

on Asset, Net Profit Margin, Asset Turnover, Return on Equity dan Ringkasan mengenai penjualan.

3. Informasi Non Keuangan; diantaranya mengenai jumlah karyawan, jumlah kompensasi, pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi, persentase penjualan dari produk baru selama lima tahun terakhir, jumlah *market share*, jumlah unit yang dijual, harga jual produk dan pertumbuhan penjualan unit produk. Pengungkapan informasi non keuangan ini juga merupakan pengungkapan yang sukarela.
4. Informasi Mengenai Masa Depan Perusahaan; diantaranya mengenai anggaran yang berkaitan dengan *market share*, anggaran arus kas, anggaran biaya modal dan biaya R&D, anggaran keuntungan dan anggaran penjualan. Pengungkapan informasi mengenai masa depan perusahaan merupakan pengungkapan sukarela.
5. Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen; Dalam peraturan Bapepam, jelas disebutkan bahwa perusahaan harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi lain yang dianggap cukup material pada bagian analisis dan pembahasan umum oleh manajemen. Beberapa item tersebut diantaranya : perubahan penjualan, perubahan laba operasi, perubahan CGS, perubahan keuntungan, Perubahan dalam biaya penjualan dan administrasi, perubahan dalam biaya bunga dan pendapatan bunga, perubahan laba bersih,

perubahan persediaan, perubahan piutang, perubahan dalam biaya modal atau R&D dan perubahan *market share*.

2.1.4 Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Tahunan

Pada umumnya perusahaan besar akan mengungkapkan lebih banyak informasi daripada perusahaan kecil. Terdapat beberapa penjelasan mengenai hal ini. Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jansen dan Meckling, 1976). Perusahaan besar mungkin akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Penjelasan lain yang mungkin adalah perusahaan besar memiliki biaya politis yang lebih besar daripada perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum. Mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik (Marwata, 2001).

Penjelasan lain yang juga sering diajukan adalah karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar. Dengan sumber daya yang besar tersebut perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap. Sebaliknya perusahaan dengan sumber daya yang relatif kecil

mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar. Perusahaan kecil pada umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan yang lain. Mengungkapkan jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar (Shinghvi dan Desai, 1971;Buzby, 1975 dalam Marwata, 2001).

2.1.4 Hubungan Porsi Kepemilikan Saham Publik dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Tahunan

Semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik, maka semakin besar tekanan yang dihadapi perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya. Hal ini dikarenakan dengan semakin besar porsi kepemilikan publik, maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga semakin banyak pula butir-butir informasi yang mendetail yang dituntut untuk dibuka dalam laporan tahunan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Di Indonesia, pengungkapan dalam laporan keuangan baik yang bersifat wajib maupun sukarela telah diatur dalam PSAK No.1. Dalam PSAK No.1 tentang penyajian laporan keuangan, manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan, dimana laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen:

1. Neraca
2. Laporan laba-rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

PSAK No.1 menganjurkan agar perusahaan menyajikan telaah keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan perusahaan, dan kondisi ketidakpastian. Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Pemerintah melalui Keputusan Ketua Bapepam KEP-134/BL/2006 juga mengatur mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pengungkapan informasi yang diatur oleh pemerintah ataupun lembaga profesional (dalam hal ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan pengungkapan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan yang telah publik. Tujuan pemerintah mengatur pengungkapan informasi adalah untuk melindungi kepentingan para investor dari ketidakseimbangan informasi antara manajemen dengan investor karena adanya kepentingan manajemen.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ungkapan wajib dan ungkapan sukarela. Sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang diungkapkan, yang dipandang manajemen relevan dalam membantu pengambilan keputusan (Hadi dan Sabeni, 2002). Pengungkapan wajib merupakan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (BAPEPAM, SAK, Menteri Keuangan, Pajak, dan lain-lain). Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. Perusahaan memiliki keleluasan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunannya sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas ungkapan sukarela antar perusahaan.

Pengungkapan laporan keuangan merupakan faktor yang penting bagi sebuah perusahaan dalam hubungannya dengan pihak eksternal perusahaan khususnya para investor. Pengungkapan laporan keuangan sangat mempengaruhi penilaian investor terhadap kinerja perusahaan. Lebih jauh Na'im dan Rakhman (2000:70) mengatakan pengungkapan laporan keuangan merupakan faktor signifikan dalam pencapaian efisiensi pasar modal dan merupakan sarana akuntabilitas publik.

Untuk membuat keputusan di pasar modal, para pelaku pasar modal harus melakukan analisis tentang kondisi emiten secara komprehensif. Analisis tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal.

Analisis fundamental ditujukan untuk menilai sekuritas berdasarkan informasi historis perusahaan, terutama dari nilai laporan keuangan. Penilaian terhadap ukuran perusahaan dan porsi kepemilikan saham publik merupakan bagian dari analisis fundamental perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan, atau nilai total aktiva. Sedangkan porsi kepemilikan saham publik adalah porsi saham yang dimiliki masyarakat atau publik domestik.

Berikut ditampilkan perbedaan antara analisis teknikal dengan analisis fundamental :

Tabel 2.2

Perbedaan Analisis Teknikal dan Analisis Fundamental

No.	Analisis Teknikal	Analisis Fundamental
1	Harga saham dipengaruhi oleh faktor-faktor irrasional	Harga dipengaruhi oleh faktor rasional
2	Tidak tergantung pada laporan keuangan	Tergantung pada laporan keuangan
3	Faktor irrasional seperti sentimen pasar akan berpengaruh untuk jangka waktu tertentu	Faktor rasional berpengaruh kepada harga untuk jangka panjang
4	Harga bergerak mengikuti pola tertentu (<i>trend</i>) untuk suatu jangka waktu tertentu pula	Harga menyesuaikan diri secara cepat apabila datang informasi baru
5	Dapat menentukan kapan saat membeli atau menjual (<i>market timing</i>)	Tidak dapat menentukan secara pasti kapan saat membeli atau menjual.

Landasan teoritis mengenai pengaruh ukuran perusahaan (*size*) terhadap pengungkapan ini tidaklah terlalu jelas. Walaupun begitu, berbagai penelitian empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh total aktiva hampir selalu konsisten dan secara statistik signifikan. Beberapa penjelasan yang mungkin dapat menjelaskan fenomena ini adalah bahwa perusahaan besar mungkin memiliki biaya produksi informasi dan biaya *competitive disadvantage* akibat pengungkapan yang lebih rendah daripada perusahaan kecil menurut Cooke (dalam Fitriani, 2001:143). Kemudian Jensen dan Meckling (dalam Subiyantoro, 1996:10) mengatakan bahwa arah hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan tersebut bisa positif tetapi tidak menutup kemungkinan berarah negatif. Di lain pihak secara teoritis, perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melaksanakan *social responsibility* (tanggung jawab sosial), menghadapi regulasi yang lebih ketat seperti tentang pengawasan harga, tingginya pajak perusahaan dan ancaman akan adanya program nasionalisasi (*threat nationalization*).

Buzby (dalam Subiyantoro, 1996:11) menduga bahwa perusahaan kecil mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi yang luas pada laporan tahunan mereka sebab banyak aktivitas banyak pula biaya yang dikeluarkan. Singhvi dan Desai (dalam Subiyantoro, 1996:11) menambahkan bahwa manajemen perusahaan kecil mungkin percaya bahwa pengungkapan yang terperinci akan membahayakan posisi kompetitifnya.

Perusahaan besar berkemungkinan memperoleh keuntungan-keuntungan dengan mengungkapkan informasi yang memadai dalam laporan tahunan,

misalnya kemudahan untuk memasarkan saham dan kemudahan memperoleh dana dari pasar modal. Sedangkan perusahaan kecil umumnya sulit untuk mendapatkan dana dari pasar modal, mengingat pembatasan ukuran aset bila terjun ke bursa, sehingga perusahaan kecil tidak dapat menikmati keuntungan dari pengungkapan informasi yang memadai (Tjakradinata, 2000).

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya. Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih banyak mengungkapkan butir-butir laporan keuangannya karena mereka memiliki lebih banyak informasi yang dapat diungkapkan. Perusahaan yang berukuran besar juga diduga mempunyai karyawan ahli berkualitas yang lebih memahami tentang pengungkapan laporan keuangan.

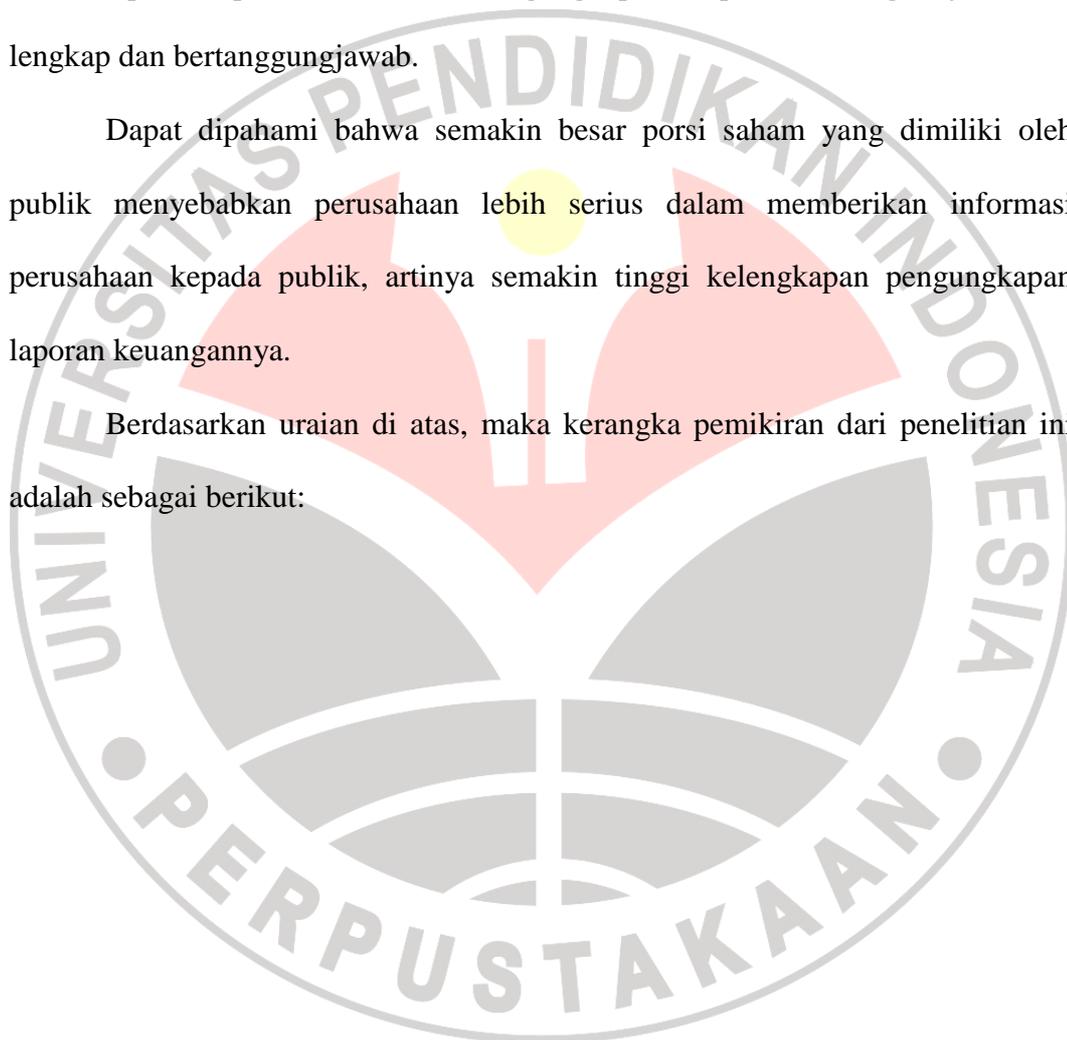
Ainun dan Fuad (2000) mengemukakan bahwa adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan semakin luas.

Perusahaan yang telah *go public* memiliki konsekuensi tinggi apalagi dengan proporsi saham publik yang lebih. Pengawasan dan pengendaliannya akan lebih didominasi oleh publik. Selain itu, perusahaan *go public* dituntut untuk lebih transparan dalam rangka menciptakan pasar modal yang efisien. Perubahan budaya dari perusahaan yang tertutup menjadi perusahaan yang harus terbuka juga dialami perusahaan yang telah *go public*.

Investor publik membutuhkan perlindungan akan investasi yang telah ditanamkan. Perlindungan itu berupa jaminan dari emiten bahwa informasi baik keuangan maupun non keuangan yang disampaikan dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan para investornya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan investor publik, perusahaan akan mengungkapkan laporan keuangannya secara lengkap dan bertanggungjawab.

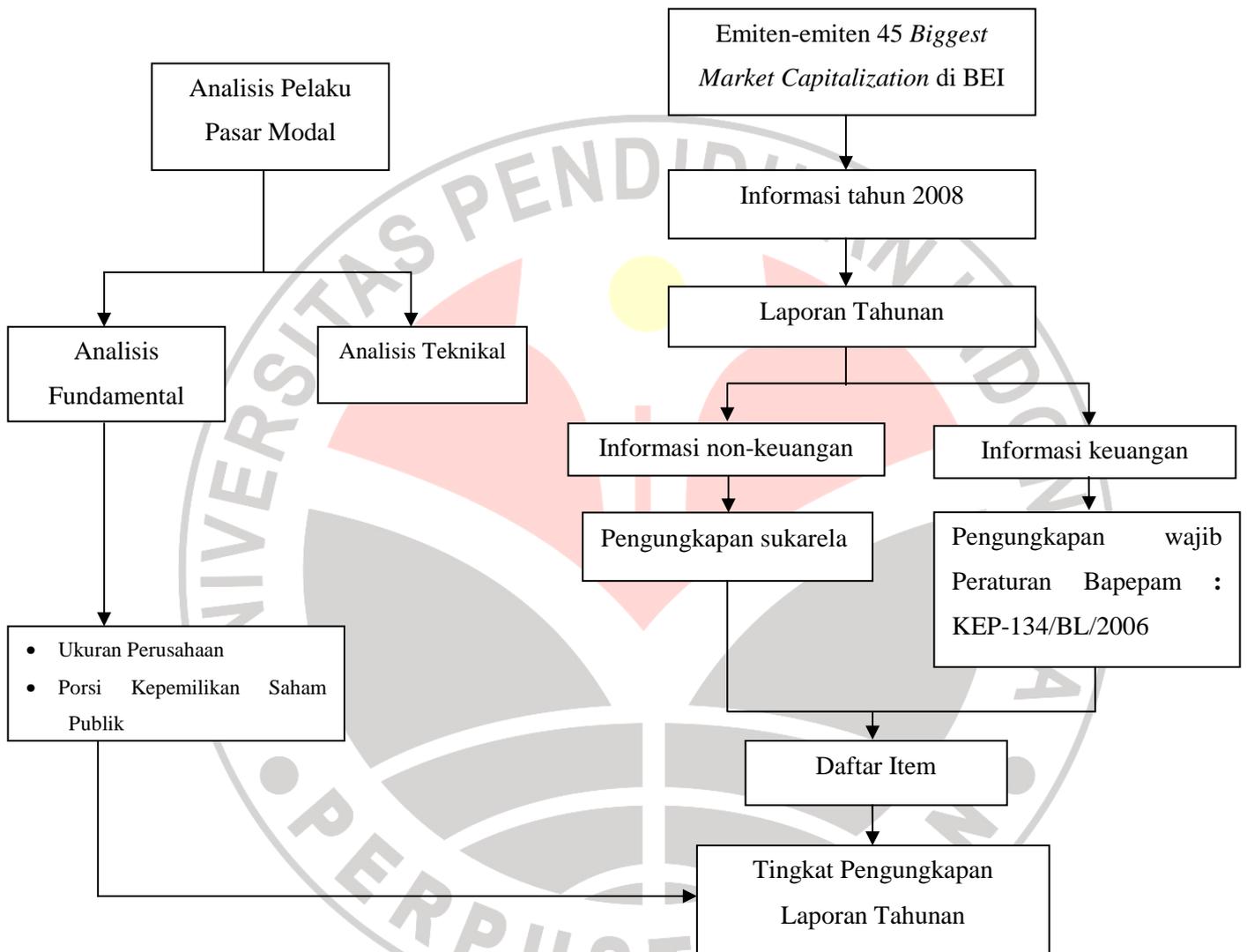
Dapat dipahami bahwa semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh publik menyebabkan perusahaan lebih serius dalam memberikan informasi perusahaan kepada publik, artinya semakin tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:64) pengertian hipotesis sebagai berikut:

”Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Menurut kerangka pemikiran di atas, penulis mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

Secara Parsial

Hipotesis pertama : Terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan laporan tahunan

Hipotesis kedua : Terdapat hubungan antara porsi kepemilikan saham publik dengan tingkat pengungkapan laporan tahunan

Secara Simultan

Hipotesis ketiga : Terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dan porsi kepemilikan saham publik secara bersamaan dengan tingkat pengungkapan laporan tahunan